

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki ruang lingkup yang sangat luas diberbagai bidang yaitu seperti sektor ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum dan sebagainya. Maka dengan demikian kebijakan public dapat dilihat dari sisi samping yaitu hierarkinya, yang dimana kebijakan public dapat bersifat rasional, regional, maupun lokal yakni seperti undang- undang, peraturan pemerintah daerah/ provinsi, dan keputusan gubernur, serta peraturan daerah dari kabupaten/ kota, dan juga Keputusan dari bupati/ walikota.

Munurut Budi Winanrno (2020:17) mengartikan kebijakan public yaitu sebagai hipotesis yang terdapat bentuk kondisi- kondisi awal dan juga akibat -akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan public tersebut harus ada perbedaan dengan bentuk- bentuk kebijakan yang lainnya, seperti kebijakan swasta. Sedangkan munurut Robert Eyestone yang telah dikutip oleh Leo Agustino (2020:6) mengartikan kebijakan public yaitu seperti hubungan antara unit pemerintah dengan semua lingkungannya.

Thomas R. Dye (2022:20) mengatakan kebijakan publik yaitu apapun yang terdapat dalam pilihan pemerintah dalam melakukannya ataupun tidak dilakukan, maksudnya adalah dalam mencapai upaya dari tujuan negara, maka pemerintah harus melakukan pengambilan dalam pemilihan langkah serta tindakan yang dimana dapat berupa tindakan dalam melaksanakan ataupun tidak terlaksananya program tersebut. tidak melakukan sesuatu program maka demikian tidak adanya

suatu kebijakan publik, maka dengan demikian untuk mencapai tujuan program tersebut maka dengan demikian harus terdapat dampak yang sama besarnya dengan pilihan yang akan dipilih demi terhadap Masyarakat (Handoyo, 2010).

Dan menurut dari pandangan George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mendefinisikan bahwa kebijakan public yaitu apa yang dilaksanakan serta dilakukan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang dimana telah ditetapkan pada peraturan -peraturan perundang-undang yang dimana terbentuk dalam pidato-pidato serta adanya wacana yang diungkapkan oleh pejabat politik dan pejabat dari pemerintah yang akan dilaksanakan dengan program -program serta tindakan dari pemerintah.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan public yaitu merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tindakan tersebut memiliki suatu proses yang sistematis serta memiliki berbagai macam konsekuensi yang berhubungan dengan berbagai lingkungannya dalam menyelesaikan masalah berbagai masalah yang terdapat pada masyarakat.

2.1.2 Karakteristik Utama Suatu Kebijakan

Sesuai dengan definisi kebijakan publik diatas maka ada beberapa karakteristik utama pada suatu kebijakan publik yaitu (Pramono, 2020):

1. Kebijakan publik pada umumnya merupakan perhatian yang dimana ditujukan pada tindakan yang dimana memiliki maksud serta tujuan tertentu pada perubahan.

2. Pada dasarnya kebijakan publik mengandung bagian yaitu pola kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan dari pada kepuasan yang berpindah- pindah,
3. Kebijakan publik yaitu dimana sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif, dimana dengan secara positif kebijakan publik akan melibatkan beberapa tindakan dari pemerintahan yang jelas terhadap mengenai suatu permasalahan. Sedangkan dengan secara negatif kebijakan publik akan melibatkan pada suatu Keputusan pejabat pemerintah dimana untuk tidak melakukan tindakan atau tidak mengerjakan apapun itu yang dimana merupakan bagian dari konteks tersebut keterlibatan pemerintah yang dimana sangat diperlukan.
5. Kebijakan publik tidak selalu didasarkan pada hukum dan juga merupakan tindakan yang dimana bersifat memerintah. Maka dengan demikian kebijakan publik merupakan kebijakan yang dimana dibuat oleh lembaga pemerintahan, yaitu pejabat pemerintah, serta instansi pemerintah yang dimana akan menjadi pedoman, pegangan, serta petunjuk pada setiap usaha serta aparatur pemerintah, dan dapat melancarkan dalam pencapaian dari tujuan kebijakan.

2.1.3 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Secara umum terdapat 3 jenis- jenis kebijakan publikn yaitu:

1. Kebijakan Umum Ekstraktif

Kebijakan umum ekstratif yaitu merupakan yang berisi dari sumber – sumber materil dan juga sumber daya manusia yang ada pada masyarakat.

2. Kebijakan Umum Distributif

Yaitu kebijakan yang dimana merupakan pelaksanaan pada alokasi yang ada pada sumber – sumber terhadap masyarakat.

3. Kebijakan Umum Regulatif

Kebijakan umum yang dimana isi kebijakan tersebut yaitu pengaturan perilaku masyarakat. kebijakan ini merupakan peraturan yang dimana harus dipatuhi oleh masyarakat.

2.1.4 Tahapan – Tahapan Dalam Kebijakan Publik

Menurut para ahli Anderson (2023:41) ada 5 langkah dalam perumusan kebijakaan yakni, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Secara umum kebijakan publuk ada 4 tahapan yaitu:

1. Tahap Penyusunan agenda, yaitu dimana tahapan ini merupakan masalah publik yang dimana tahapan ini yaitu suatu penyelesaian dari masalah publik, dan kemudian menjadi perumusan kebijakan.
2. Tahapan perumusan kebijakan, yaitu merupakan tahap pada masalah ini ada terdapat dalam suatu agenda kebijakan yang akan dibahas dengan secara bersama-sama dengan para pelaku kebijakan dan akan dirumuskan kedalam alternatif pada pemilihan untuk mendapatkan pada pemecahan masalah.
3. Tahap implementasi, dimana tahap ini yaitu dimana program yang telah dibuat telah diputuskan serta dirumuskan kemudian dijadikan menjadi

alternatif dalam penyelesaian masalah yang dimana akan dilaksanakan oleh para bidang administrasi serta para birokrat terendah.

4. Tahap evaluasi kebijakan yaitu merupakan tahapan kebijakan yang dimana telah dilaksanakan dan dinilai serta di evaluasi sudah sejauh mana tingkat dalam penyelesaian masalah kemudian dengan memperhatikan kendala dan juga dampak dari penyelesaian dari pemecahan masalah tersebut.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (2022:2) mendefinisikan makna dari implementasi yaitu program tersebut dinyatakan berlaku atau dirumuskan sehingga menjadi fokus perhatian dalam implementasi kebijakan, baik itu kegiatan-kegiatan yang timbul dari sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, baik itu mencakup usaha yang dimana menimbulkan adanya akibat serta dampak nyata terhadap masyarakat. Sedangkan definisi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (2022:3) yaitu implementasi menjadi kebijakan publik yang dimana sebagai tindakan – tindakan yang ada dalam keputusan-keputusan sebelumnya (Nurmayana, 2022).

Menurut Brian W. Hogwood dan Levis A. Gun (2020:10) didalam teori implementasi kebijakan negara maka terdapat syarat- syarat untuk mengimplementasikan kebijakan negara dengan secara baik yaitu: 1) yaitu harus kondisi yang eksternal yang dimana dihadapi oleh badan pelaksana instansi dan tidak akan dihadapi oleh gangguan serta kendala yang cukup serius. 2) dalam melaksanakan program harus tersedia program waktu serta sumber – sumber yang sangat memadai. 3) terdapat sumber – sumber yang cukup memadai. 4) dalam

pelaksanaan kebijaksanaan yang akan diimplementasikan harus didasarkan dengan suatu hubungan dengan kualitas yang handal. 5) pada kualitas hubungannya harus bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai pada penghubungnya. 6) hubungannya saling ketergantungan kecil. 7) harus memiliki pemahaman yang mendalam serta kesepakatan terhadap tujuan. 8) pada penyusunan tugas harus terperinci dan ditempatkan di urutan yang tepat. 9) koordinasi dan komunikasinya harus sempurna. 10) pihak – pihak serta wewenangnya pada kekuasaannya harus dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Menurut George C. Edwards III (2020:17-18) terdapat beberapa variable yang dimana mempengaruhi pada keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur birokrasi (Pramono, 2020).

2.3 Definisi Evaluasi Kebijakan

Menurut Thomas Dye (2020: 547). mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan pembelajaran yang dimana berisi tentang konsekuensi dari kebijakan public, evaluasi kebijakan yaitu pemeriksaan dengan objektif, sistematis, dan empiris terhadap sisi dari kebijakan dan program publik terhadap pencapaian dari tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi adalah salah satu rangkaian proses kegiatan pada sebuah proses implementasi kebijakan. dengan melalui evaluasi maka akan memperoleh informasi yaitu tentang apa yang akan dicapai dan apa yang belum tercapai dari program yang telah dibuat (Issn, 2023). Dan informasi dari hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan dipakai sebagai bahan pada perbaikan program tersebut. Maka dengan demikian kata lain evaluasi akan diketahui yaitu efektifitas, efisiensi, kualitas, dan

kinerja, serta produktivitas dari suatu lembaga tersebut dalam melakukan terlaksananya programnya dan sekaligus dalam meningkatkannya (Riyanda & Dompok, 2017). Arti penting dari pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut adalah untuk melihat kembali apakah dari suatu program dari kebijakan pemerintah tersebut dapat terlaksana dengan secara efektif sesuai dengan pada perencanaan dalam mencapai hasil yang sesuai dengan harapan. Evaluasi kebijakan yaitu akhir pada proses yang dimulai dalam merumuskan, menguji, mengadopsi kebijakan, serta implementasi, dan evaluasi. Evaluasi yaitu cara bagaimana untuk mengetahui outcome pada kebijakan dan program (Hajaroh, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan salah satu proses dalam menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik yang dimana tidak hanya untuk melihat hasil atau dampak dari konsekuensi tersebut tetapi juga dilihat bagaimana dalam proses pelaksanaan dengan secara yang objektif, sistematis, dan juga dengan secara empiris dengan target untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik yang dimana sebelumnya sudah dan telah dibuat serta dirumuskan. Evaluasi juga dapat menilai pada keterkaitannya dengan teori kebijakan dan juga praktiknya dari implementasi pada bentuk serta dampak kebijakan, yang dimana dampak tersebut sesuai dengan apa yang diperkirakan atau tidak. Dan dengan secara normatifnya fungsi dari evaluasi sangatlah dibutuhkan yang dimana sebagaimana bentuk dari pertanggungjawaban publik, dan juga terhadap masyarakat yang dimana semakin kritis dalam menilai pada kinerja pemerintah.

2.3.1 Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan dari evaluasi ada 4 tujuan yaitu:

1. Untuk mengukur efek dari suatu program kebijakan yang ada pada kehidupan masyarakat yang dimana dengan membandingkan kondisi dengan yang sebelum dan setelah dengan adanya program tersebut. Adapun dengan cara membandingkan efek terhadap dengan tujuan dengan mengharuskan dengan penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan.
2. Untuk memperoleh informasi yaitu mengenai tentang kinerja dari implementasi kebijakan dan juga menilai kesesuaian dari perubahan pada program yang dimana sesuai dengan rencana.
3. Memberikan umpan balik terhadap manajemen pada rangka untuk perbaikan serta penyempurnaan pada sebuah implementasi.
4. Untuk memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan terhadap pembuat kebijakan yang dimana lebih lanjut dalam mengenai program yang pada akan masa mendatang. Yang akan menjadi pertanggungjawabam publik dalam memenuhi akuntabilitas publik.

2.3.2 Fungsi Evaluasi

Evaluasi kebijakan yaitu berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik yang dimana dikarenakan adanya sebuah kajian evaluasi yang harus mampu memenuhi esensi dari akuntabilitas tersebut menurut (2020: 145). Yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan eksplanasi yang logis atas dasar dari realitis pada pelaksanaan pada suatu program, atau kebijakan. dengan melalui evaluasi maka disini evaluator dapat menemukan yaitu variabel– variabel kebijakan yang diman akan mempengaruhi pada keberhasilan pelaksanaan pada suatu program.

2. Mengukur kepatuhan, dimana maksudnya adalah apakah mampu melihat pada kesesuaian pada antara pelaksanaan yang dengan standar serta pada prosedur yang dimana telah ditetapkan.
3. Untuk melakukan sebagai auditing dalam melihat output kebijakan apakah sampai pada sasaran yang akan dituju, kemudian ada tidaknya penyimpangan terhadap melaksanakan program tersebut.
4. Akunting yaitu melihat serta mengukur dari akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Dan fungsi utama evaluasi yaitu:

1. Memberikan informasi yang valid dan juga dapat dipercaya mengenai dengan kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh pada kebutuhan, nilai dan kesempatan dimana telah dicapai pada tindakan public.
2. Evaluasi memberikan klarifikasi dan kritik kepada nilai– nilai yang dimana didasari dengan pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas, serta mendefinisikan serta mengoperasikan pada tujuan dan juga target.

2.3.3 Karakteristik Evaluasi Kebijakan

Munurut Dunn (2020: 608-609), terdapat beberpa karakteristik evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Fokus Nilai. Evaluasi diutamakan dalam penilaian yang menyangkut pada keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program tersebut.
2. Interdependensi fakta nilai. yaitu dimana adanya tuntutan dari evaluasi tersebut tergantung pada fakta ataupun nilai. Yang dimana untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tersebut telah mencapai tingkat

dari kinerja yang tertinggi atau terendah, yang dimana diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan yang berharga bagi setiap sejumlah individu, kelompok, ataupun seluruh masyarakat.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluative, yang dimana berbeda dengan tuntutan advokatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, dibandingkan hasil dimasa depan.

2.3.4 Jenis Evaluasi

Nugroho (2020:143) secara umum terdapat 3 jenis evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi tahap perencanaan

Evaluasi diartikan yaitu sebagai tahap perencanaan dalam rangka untuk memulai mencoba dan memilih serta menentukan pada skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan juga terhadap untuk mencapai tujuan yang dimana telah dirumuskan sebelumnya, maka perlu adanya teknik yang digunakan pada perencanaan.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini evaluasi merupakan kegiatan dimana melakukan Analisa untuk menentukan pada tingkat kemajuan dalam pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Dimana tujuan dari evaluasi yaitu untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan ingin mengetahui bahwa program tersebut telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Evaluasi melihat sudah sejauh manakah program tersebut untuk mencapai tujuan, dan apakah tujuan tersebut

2.3.5 Model Evaluasi Kebijakan

Berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik, membuat taksonomi pada evaluasi kebijakan publik yaitu dengan melalui beberapa model yaitu (Batam, 2021):

1. Model system yaitu dengan indikator utamanya adalah efisiensi
2. Model system perilaku yang dimana indikator utamanya adalah produktivitas dan akuntabilitas.
3. Model formulasi Keputusan yang menjadi indikator utama adalah keefektifan serta keterjagaan kualitas.
4. Model system tujuan bebas (goal free) indikator utama yaitu pilihan pengguna serta manfaat sosial.
5. Model system kekritisian seni indikator utama yaitu standar yang dimana semakin baik serta kesadaran yang semakin meningkat.
6. Model system review professional indikator utama yaitu penerimaan profesional.
7. Model system kuasi-legal indikator utama yaitu resolusi.
8. Model system kasus indikator utama yaitu pemahaman atas diversitas.

2.3.6 Tipe – Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Sedangkan menurut Jame Anderson (2020:36) ada beberapa tipe- tipe evaluasi kebijakan yaitu:

1. Evaluasi yaitu suatu kegiatan yang fungsional sehingga dipandang yaitu sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan.
2. Evaluasi pada sebuah kebijakannya berfokus pada kinerja, sehingga dapat memilih kejujuran serta efisiensi pada pelaksanaannya.

3. Evaluasi kebijakan sistematis yaitu dimana mencoba memberikan jawaban pada atas pertanyyam yang dimana sesuai dengan tujuan kebijaka awal, biaya- biaya serta digunakan dan keuntungan apa yang diraih serta penerimaan pada keuntungan.

Dan menurut Dane (2020:139) menyebutkan ada dua tipe pada evaluasi yaitu:

1. *Sumative evaluation* yaitu penilain dampak pada suatu program yang dimana disebut juga dengan evaluasi dampak (outcome evaluation).
2. *Formative evaluation* yaitu suatu penilaian terhadap suatu proses pada program, yang dimana disebut dengan evaluasi proses.

2.3.7 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Beberapa pendekatan pada evaluasi kebijakan yaitu (Studi et al., 2020):

1. Evaluasi Semu

Yaitu evaluasi dengan pendekatan yang dimana menggunakan dengan metode deskriptif yang dimana untuk menghasilkan informasi yang valid serta dapat dipercaya mengenai hasil dari kebijakan, dan tanpa berusaha pada menanyakan mengenai tentang manfaat, nilai, dari hasil -hasil tersebut terhadap individu, kelompok dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dan bentuk utama dari evaluasi semu ini yaitu dimana mencakup pada berbagai pendekatan yaitu dimana untuk pemantauan yang eksperimentasi sosial, akuntansi sistem sosial, serta pemeriksaan sosial, dan juga sintesisi penelitian serta praktik. Pada evaluasi semu secara khusus menerapkan yaitu bermacam metode, yaitu kuesioner, random samplinh, dan juga teknik

statistic yang dimana menjelaskan berbagai variasi dari hasil kebijakan yang menjadi sebagai produ dari variable masukan dan proses.

2. Evaluasi Formal

Yaitu merupakan pendekatan yang dimana menggunakan untuk metode deskriptif yang dimana untuk menghasilkan dari berbagai informasi yang valid dan cepat dipercaya dengan hasil – hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut dengan atas dasar dari tujuan program, kebijakan yang dimana telah diumumkan dengan secara formal oleh para pembuat kebijakan.

Asumsi utama dari evaluasi formal ini yaitu bahwa tujuan dari target yang diumumkan dengan secara formal yakni merupaka ukuran yang tepat bagi maanfaat atau dari nilai kebijakan program. Evaluasi formal dimana memiliki tipe – tipe dan kriteria evaluative paling sering digunakan yaitu efektifitas dan efisiensi.

3. Variasi evaluasi formal.

Evaluasi perkembangan ini yaitu dimana merujuk pada kegiatan yaitu aktivitas evaluasi dengan secara eksplisit yang diciptakan untuk melayani kebutuhan sehari – hari. Pada evaluasi perkembangan ini bersifat formatif dan juga meliputi dengan control yang dengan secara langsung dan juga dapat digunakan untuk mengadaptasi dengan secara langsung pengalaman baru yang dimana diperoleh dengan melalui manipulasi yang sistematis kepada variable masukan dan proses.

4. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi Keputusan teoritis yaitu dengan pendekatan dengan menggunakan metode diskripsi untuk menghasilkan pada informasi yang kemudian dapat dipertanggung jawabkan serta valid mengenai hasil dari kebijakan yang dimana secara eksplisit dengan dinilai dengan berbagai macam pelaku kebijakan. evaluasi Keputusan teoritis yaitu dimana untuk berusaha dalam mengidentifikasi diberbagai pelaku kebijakan ini serta menampakkan tujuan yang dimana mejadi salah satu tujuan utama dari evaluasi teoritis (Amanda, 2019) Keputusan yaitu untk menghubungkan pada informasi yang dimana mengenai hasil kebijakan yaitu dengan nilai berbagai pelaku kebijakan.

Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan yaitu dengan bahwa tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan baik yang dinyatakan dengan secara formal ataupun secara tersembunyi yang merupakan ukuran yang layak kepada manfaat atau nilai dari kebijakan serta program.

2.3.8 Tahapan Evaluasi Kebijakan

Untuk melakukan evaluasi kebijakan maka ada tahapan yang harus diikuti, menurut para ahli Edward A. Suchiman (2020:48) menemukan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

1. Mengidentifikasi pada tujuan program yang akan dievaluasi.
2. Analisis pada masalah
3. Deskripsi dan juga standarisasi pada kegiatan
4. Pengukuran terhadap pada tingkatan pada perubahan yang akan terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang akan diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut serta penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator yang dimana dapat menentukan keberadaannya pada suatu dampaknya.

2.3.9 Indikator Evaluasi

Evaluasi kebijakan menurut model Leo Agustino (2016:196) terdapat lima kriteria yaitu:

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Keberhasilan yang ada pada suatu pelaksanaan kebijakan dan selanjutnya maka akan dievaluasi hasilnya yaitu dilakukan oleh sumber daya aparatur (SDA). Maksudnya adalah pada saat evaluatuor melakukan evaluasi maka, yang untuk pertama kali dievaluasi yaitu aparatur yang pertama dievaluasi, supaya untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dibuat.

2. Kelembagaan

Adapun yang termasuk dalam konteks kelembagaan ini yaitu koordinasi yang lancar, dari diskresi yang fleksibel dan juga sistem pada organisasi, pola kepemimpinan, yang menjadikakn indikasi arah evaluasi yang positif. Maka dengan demikian pada halnya evaluasi kebijakan, apabila pada koordinasi tidak lancar, dan direksi yang fleksibel, dan pada sistem organisasinya terlalu kaku serta komando pada pola kepemimpinan yang otokartik maka akan dapat membuat suatu kebijakan tidak akan berhasil.

3. Sarana, Prasarana dan Teknologi

Pada kriteria ini akan dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan, Ketika dilakukanya evaluasi apakah pemerintah menyediakan banyak sarana dan prasarana serta teknologi.

4. Finansial

Finansial merupakan salah satu dukungan dari evaluasi kebijakan, finansial merupakan dukungan dari pemerintah yang dimana dalam melakukan evaluasi kebijakan akan lancar dan baik apabila adanya dukungan finansial.

5. Regulasi (pendukung)

Pada suatu kebijakan maka sering memerlukan yaitu regulasi pendukung, dimana bertujuan agar dapat dioperasikan menjadi lebih aplikatif. Pada era orde baru, maka suatu kebijakan ada terdapat berupa dukungan yaitu petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknis dimana supaya untuk memudahkan pada banyak pihak yang menjadi subjek pada suatu kebijakan dalam melakukan mengoperasikan kebijakan tersebut. Maka dengan demikian evaluasi kebijakan akan dapat dinilai dan keberhasilannya akan sangat dipengaruhi yaitu ada atau tidaknya regulasi pendukung.

2.3.10 Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan

Terdapat beberapa faktor yang dimana kebijakan tidak dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan ada 5 faktor menurut (Dye 2010:155) yaitu:

1. Adanya keterbatasan dana sehingga mengakibatkan program tersebut menjadi gagal.

2. Adanya kesalahan administrasi sehingga yang dimana ditunjukkan dengan misi kebijakan, walaupun isi dari kebijakan tersebut baik namun administrasi kebijakan tersebut sangat jelek, maka implementasi dari kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan.
3. Kurang adanya komprehensifnya dan tujuan serta sasaran yang jelas pada pertimbangan kebijakan, dimana hal ini disebabkan karena para pembuat kebijakan hanya memperhatikan beberapa faktor- faktor tertentu saja.
4. Kebijakan publik tersebut yang bertentangan dengan kebijakan lainnya. Dimana harus ada dukungan dan partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya.
5. Adanya usaha pada pemecahan masalah yang cukup besar pada sumber yang lebih kecil dari pada bobot masalah itu sendiri dan ketersediaan dan kualitas data, maka evaluasi harus memerlukan data yang akurat dan memadai

Dan juga evaluasi kebijakan juga sering menunjukkan bahwa kebijakan tidak dapat mencapai tujuannya dikarenakan ada beberapa faktor yang merintang pada pencapaian tujuan tersebut yaitu:

1. Masalah- masalah dari masyarakat sering disebabkan karena banyak faktor, sementara kebijakan tersebut berhungan dengan upaya penyelesaian pada satu atau beberapa masalah.
2. Isi dari kebijakan tersebut tidak mempunyai tujuan yang tidak sesuai, sehingga menimbulkan pertentangan dengan yang lainnya.

3. Untuk memecahkan masalah tersebut maka akan dapat mengahibiskan biaya yang lebih besar dari pada masalah itu sendiri.

Banyak permasalahan dari masyarakat yang tidak dapat dipecahkan dan juga tidak dapat diselesaikan.

2.4 Konsep Jalan di Indonesia

Jalan adalah bagian dari salah satu dari prasarana transportasi yang dimana sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi dan juga sosial masyarakatnya. Adapun fasilitas dari transportasi darat yang dimana didukung oleh jaringan jalan, yaitu sebagai bagian dari fasilitas fisik infrastruktur bagi setiap kepentingan masyarakat.

2.4.1 Sistem Jaringan Jalan

Jaringan jalan yaitu salah satu sistem yang mengikat serta menghubungkan dari berbagai pusat pertumbuhan terhadap dengan wilayah yang berbeda dan menjadi pengaruh dalam pelayanan pada suatu hirarki.

Adapun peran dalam pelayanan jasa distribusinya pada sistem jaringan jalan yaitu terdiri dari:

1. Sistem jaringan jalan Primer, yaitu dimana sistem pada jaringan jalan yang dengan peranan pada pelayanan jasa distribusi dalam pengembangan semua wilayah pada tingkat nasional dan juga dengan pada semua simpul jasa distribusi yang kemudian berwujud menjadi kota.

2. Sistem jaringan jalan Sekunder, adalah sistem jaringan yang dimana dengan peranan yang menghubungkan pada pelayanan jasa distribusi kepada masyarakat di bagian dalam kota.

Dan juga terdapat beberapa pengelompokkan jalan yang dimana berdasarkan pada peranannya yaitu menjadi 3 yaitu:

1. Jalan Ateri, merupakan jalan yang dimerupakan angkutan yang melayani dengan jarak jauh dan juga dengan kecepatan pada rata – rata tinggi serta jumlah masuk yang dibatasi dengan secara yang efisien.
2. Jalan Kolektor, merupakan jalan yang dimana angkutan melayani dengan adanya pengumpulan dan pembagian yang berciri- ciri yaitu perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata – rata rendah dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan lokal, adalah jalan yang melayani angkutan setempat yang berciri- ciri dengan perjalanan jarak dekat, serta kecepatan diatas rata- ratanya rendah dan juga jumlah pada jalan masuknya dibatasi.

Adapun klasifikasi jalan yang dimana berdasarkan dengan peranannya, maka kewenangan dalam pengelolaanya terbagi menjadi 2 kelompok yaitu:

1. Pemerintah pusat, pemerintah pusat dapat memiliki kewenangan yaitu dalam pengelolaan sistem jaringan jalan primer yaitu berupa jalan nasional ataupun jalan provinsi.
2. Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki bagian kewenangan pada pengelolaan sistem jaringan jalan skunder yaitu jalan kabupaten/ kota.

2.4.2 Institusi Pengelola Pemeliharaan Jalan

Dalam wewenang penyelenggaraan umum yaitu ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pada penguasaan jalan merupakan bagian dari pada Negara yang dimana bertujuan supaya peran jalan dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara serta keseimbangan dalam pembangunan antara dengan wilayah lainnya dapat terjaga. Negara memberikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yaitu wewenang dalam melaksanakan penyelenggaraan jalan. Dalam UU No 38 tahun 2004 tentang jalan, megatakan bahwasannya masyarakat ikut berperan serta pada penyelenggraan jalan.

Wewenang dalam penyelenggaraan jalan tersebut yaitu meliputi kegiatan - kegiatan yaitu seluruh siklus kegiatan serta perwujudan jalan yaitu merupakan pengaturan, pembinaan, Pembangunan, serta dalam pengawasan jalan.

2.4.3 Konsep Pengelolaan Pada Pemeliharaan Jalan

Konsep pemeliharaan dalam pemeliharaan jalan yaitu merupakan suatu proses yang dimana untuk mengoptimalkan pada kinerja jaringan jalan disepanjang tahun yang dimana secara umum yang bertujuan untuk menjaga agar jalan tersebut sehingga tetap berfungsi pada melayani pada kebutuhan ekonomi sosial masyarakat disepanjang tahun dan sehingga mengurangi tingkat pada kerusakan serta biaya operasi pada kendaraan. adapun rencana pemeliharaan jalan meliputi sisten informasi, sistem manajemen dan rencana penanganan pemeliharaan jalan yang dimana meliputi yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitas jalan yang dimana meliputi pemeliharaan tahap – tahap serta rasional serta terpadu yang dikenal dengan istilah siklus pemeliharaan (Hakim, 2015).

Di Provinsi Kepulauan Riau dimana memiliki ruas Panjang jalan Negara yaitu 160,20 km dan Panjang jalan provinsi 112, 35 km, dan Panjang jalan Kabupaten/ Kota yaitu 646,

16 km, dan adapun total Panjang jalan keseluruhan Kepulauan Riau yaitu 918. 71 km. pada pengelolaan pemeliharaan jalan di Provinsi Kepulauan Riau telah dibagi- bagi pada tugas dan wewenangnya. Pengelolaan jalan Kota di Kota Batam yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan Kota di Kota Batam yaitu tugas dari Dinas Bina Marga.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan berhubungan erat pada temuan penelitian sebelumnya, dan kemudian akan menjadi bahan referensi dan kajian. Adapun penemuan penelitian berikut ini akan digunakan menjadi sebagai sumber referensi yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Mifthuljannah, Budi Setiawati, dengan judul penelitian yaitu “Evaluasi Kebijakan pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur jalan di desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”. Yang dipublikasikan di jurnal Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisni (JAPB), Vol 6 Tahun 2023 ISSN 2723-0937. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu mengatakan bahwa evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa terhadap Pembangunan infrastruktur jalan desa Masintan Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong menyatakan dalam pelaksanaannya cukup baik ,(Issn, 2023).
2. Penelitian ini dilakukan oleh Laurencia, Ajawaila. Welson, Rompas, Femmy, Tulusan. Yang berjudul “Evaluasi kebijakan Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara”. Jurnal dipublikasikan di Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi, Vol 7 No 104, Tahun 2021, ISSN 2338-9613. Metode penelitian ini yaitu

Kualitatif, Hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah Kabupaten Halmahera melakukan Pembangunan di bidang infrastruktur tetapi pada infrastruktur jalan kurang memadai sehingga masyarakat menjadi terhambat menggunakan sarana tersebut, kendala ini yaitu berasal dari dana Pembangunan yang tidak difokuskan , sehingga menyebabkan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Kecamatan Tobelo belum bisa dimaksimalkan 100 %. (Ajawaila et al., 2021).

3. Penelitian ini dilakukan oleh Abdul R, dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”. Jurnal di publikasikan di jurnal kajian kebijakan dan ilmu administrasi negara (JURNAL ADMINISTRATOR), Vol 1 No 1, Tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, hasil dari penelitian ini yaitu bahwa secara keseluruhan ketiga desa yang menjadi sasaran yaitu Bollang, Bantin, dan Lolan PPIP di kecamatan Bollang dimana telah mengikuti pada tahapan- tahapan pelaksanaan Pembangunan infrastruktur perdesaan. Infrastruktur yang dibangun pada ketiga sasaran tersebut diterima oleh masyarakat dimana karena masyarakat telah dilibatkan yaitu mulai dari tahapan survey, perencanaan, dan juga pada pelaksanaan pembangunanpun tepat pada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa (Dilapanga, 2019).
4. Penelitian ini dilakukan oleh Eko, Reydonnyzar, Mohamad Nurpahdi. Dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor”. Jurnal ini dipublikasikan di jurnal Jurnal

ilmu pemerintahan Widya Praja, Vol 45 No 1, Tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa dari 6 dimensi tersebut ada 2 dimensi yang menunjukkan kondisi yang baik dalam mendukung kebijakan yaitu dimensi efektivita dan efisiensi. Dan ada beberapa dimensi yang dimana memiliki kelemahan yaitu responsivitas, perataan, kecukupan, dan ketepatan kebijakan (Santoso et al., 2019).

5. Penelitian ini dilakukan oleh Rosi Agustina, Gunawan Undang, dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Perbaikan Jalan dan Penerangan Jalan Untuk Kelancaran Aktivitas Warga di Jatinangor Kota Sumedang. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Perceka, Vol 01 No 01, Tahun 2023. Metode yang digunakan yaitu Kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Kajian teoritis ini memberikan penjelasan terhadap sejumlah fenomena. Mengkaji terlebih dahulu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Sumedang. Kedua, beberapa penyebab seperti kendaraan berat dan cuaca buruk dapat menyebabkan kerusakan jalan (Agustina, 2023).
6. Penelitian ini dilakukan oleh Haeril, dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima”. Jurnal ini dipublikasikan di jurnal MIMBAR ADMINISTRASI, Vol 20, No.2, Tahun 2023. Metode yang digunakan yaitu Kulitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Aksesibilitas dan infrastruktur yang buruk merupakan hambatan utama terhadap pertumbuhan ekonomi. Berinvestasi di pelabuhan

dan peningkatan infrastruktur lainnya akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas pasar. Mempertahankan potensi pertanian dan perikanan suatu wilayah bergantung pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Penegakan undang-undang terlarang yang ketat terhadap operasi dan aktivitas penangkapan ikan adalah hal yang perlu dilakukan, begitu pula dengan mendidik masyarakat tentang penangkapan ikan yang berkelanjutan. Wilayah ini terkena dampak perubahan iklim, termasuk peningkatan permukaan air laut dan cuaca buruk. Oleh karena itu, perlu dirancang metode adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Program bantuan telah dilaksanakan, berdasarkan evaluasi kebijakan pembangunan ekonomi, namun masih banyak yang perlu dilakukan untuk memfokuskan kebijakan pada pengurangan kemiskinan, pemberdayaan perekonomian, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

7. Penelitian ini dilakukan oleh Drs, Sapto Pramono, Msi, dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Pembangunan Frontage Roads dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Surabaya”. Jurnal di publikasikan di jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol.3, No 2, Tahun 2019. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, hasil dari pembahasan yaitu Dengan membangun infrastruktur transportasi. Hal ini menandakan Kota Surabaya semakin menambah ruas jalan. Sebagai agen pembangunan, Surabaya perlu melakukan perbaikan sejumlah ruas jalan. Sebab, jalan tersebut berfungsi sebagai infrastruktur pendukung perluasan pembangunan wilayah yang dapat mendongkrak perdagangan dan pada akhirnya

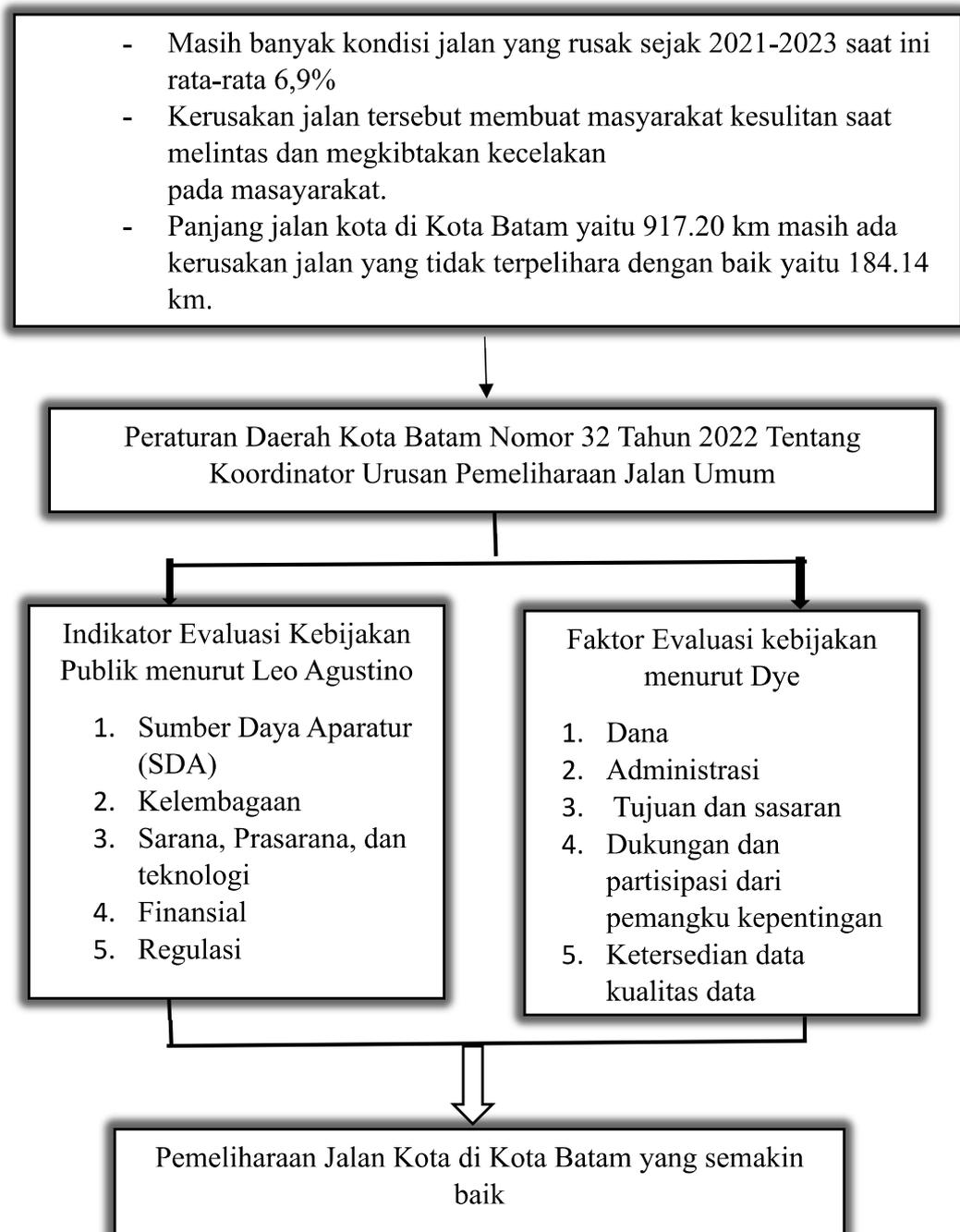
mendorong pertumbuhan pembangunan di Kota Surabaya. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk melestarikan lingkungan hidup kota Surabaya sekaligus memajukannya menjadi kawasan pedalaman secara nasional (Kebijakan et al., n.d.).

8. Penelitian ini dilakukan oleh Indra Kristian, dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Kiara Condong Kota Bandung”. Jurnal dipublikasikan di jurnal DIALEKTIKA jurnal Ilmu Sosial, Vol.19, No. 2, Tahun 2021. Adapun hasil dari pembahasa penelitian ini yaitu Kebijakan penyiapan pedagang kaki lima hanya dapat memenuhi syarat-syarat dalam rangka mencapai tujuan; Untuk mempertahankan pencapaian ini, petugas harus dilibatkan secara aktif. Selain itu, pemerintah dan pedagang harus menindaklanjutinya untuk mencapai tujuan berdasarkan lima kriteria evaluasi kebijakan lainnya. Respon pemerintah berupa lebih ketatnya pengawasan terhadap PKL untuk meningkatkan efektivitasnya, lebih matang dalam menata fasilitas fisik untuk meningkatkan efisiensinya, lebih transparan dalam memberikan pelatihan bagi mereka untuk meningkatkan kecukupannya, lebih banyak pendataan dan pengawasan terhadap PKL. mereka untuk meningkatkan kesetaraan mereka, dan lebih banyak kerjasama antar lembaga pemerintah untuk meningkatkan pencapaian kriteria tanggung jawab mereka (Kristian, 2021).
9. Penelitian ini dilakukan oleh Vita dan Riswanda, dengan judul penelitian “Evaluasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak pada SMPN 18 Kota Tangerang

Selatan”. Jurnal dipublikasikan di Indonesia Journal of Social and Political Sciences (PISTEMIK), Vol 05, No 1, E-ISSN: 2087-811X Tahun 2024 Metode yang digunakan yaitu kualitatif, adapun hasil pembahasan yaitu bahwa Program Sekolah Ramah Anak di Kota Tangsel belum berjalan maksimal berdasarkan temuan penelitian dengan menggunakan kerangka evaluasi Leo Agustino yang meliputi aspek Aparatur atau Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Prasarana dan Teknologi, Keuangan atau Finance, dan Peraturan atau Dukungan. Secara khusus, studi kasus SMPN 18 Kota Tangsel menyoroti permasalahan tersebut (Oktaviani, 2024).

2.6 Kerangka Pemikiran

Berikut ini merupakan gambaran pada kerangka pemikiran pada penelitian ini yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikir.